

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (2005). TRA diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu sendiri. Sebaliknya, TPB dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*), tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, intensi merupakan fungsi dari tiga determinan, pertama yang bersifat personal, kedua merefleksikan pengaruh sosial dan ketiga berhubungan dengan masalah kontrol (Ajzen, 2005:34). Berikut ini adalah penjabaran dari variabel utama dari *Theory of Planned Behavior* yang terdiri dari :

##### a. Intensi (*Intention*)

Intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Intensi memainkan peranan yang khas dalam mengarahkan tindakan, yakni menghubungkan antara

pertimbangan yang mendalam yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu. Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2005: 36). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada *belief* bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut.

#### b. Sikap Seorang Terhadap Perilaku

Teori ini menjelaskan tentang sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, seseorang yang percaya bahwa menampilkan perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang positif akan memiliki sikap *favorable* terhadap ditampilkannya perilaku, sedangkan orang yang percaya bahwa menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang negatif, maka ia akan memiliki sikap *unfavorable* (Ajzen, 2005:37). Secara umum *Attitude Toward The Behavior* berkaitan dengan sikap dasar seorang (*person in nature*) yang berpengaruh terhadap intense berperilaku dan berhubungan dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control*.

#### c. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

*Subjective Norms* merupakan faktor dari luar individu yang berisi persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tingkah laku yang ditampilkan (Baron & Byrne, 2000: 97). Norma

subjektif ditentukan oleh adanya keyakinan normatif (*normative belief*) dan keinginan untuk mengikuti (*motivation to comply*) (Ajzen, 2005:38).

Dalam *Theory of Planned Behavior*, *Subjective Norms* juga diidentikan dengan *belief* dari seseorang tentang reaksi atau pendapat orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu, harus, atau tidak boleh melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener, Delamater, & Myers, 2004: 86).

*Theory of Planned Behavior* mempelajari tentang sikap terhadap perilaku. Penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku, yaitu kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Seseorang akan menampilkan suatu perilaku yang positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu sehingga memunculkan intensi untuk berperilaku yang ditentukan oleh sikap. Selain itu ada juga faktor dari luar individu yang berisi persepsi dan keyakinan seseorang untuk menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Teori ini juga mengemukakan kemampuan diri individu dalam melakukan suatu perilaku dari pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku yang bisa didapatkan informasinya dari orang lain juga.

*Theory of Planned Behavior* akan mempengaruhi pelaku UKM untuk meningkatkan kemampuan dalam diri dengan pendidikan yang termasuk dalam

salah satu variabel *Theory of Planned Behavior* yakni intensi. Dengan intensi, pelaku UKM akan melakukan pertimbangan mendalam terhadap usaha dan ukuran usaha yang dijalankan untuk mengambil suatu tindakan. Latar belakang pendidikan akan mempengaruhi intensi dalam pengambilan keputusan untuk usahanya. Latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi sikap seseorang untuk bertindak. Variabel norma subjektif dalam *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan variabel pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UKM karena merupakan faktor untuk menentukan persepsi dari tindakan yang diambil berdasarkan pengetahuan akuntansi yang dimiliki.

### **2.1.2. Latar Belakang Pendidikan**

Latar belakang pendidikan adalah yang dapat membedakan tingkat rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UKM. Pemilik UMKM dengan latar belakang pendidikan selain akuntansi atau ekonomi cenderung lebih lama dan sulit dalam memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP daripada pengusaha UMKM dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi (Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Walaupun Rudiantoro & Siregar (2011) menemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengusaha UMKM terhadap pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak berarti bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan akuntansi pemilik/staf akuntansi pada UKM terhadap praktik akuntansi di UKM, karena sebagaimana hasil penelitian Suhairi, dkk (2004) yang menemukan bahwa locus pengawasan,

keinginan berprestasi, dan pengetahuan akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam keputusan investasi. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) lainnya yang menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi serta jenjang pendidikan terakhir pengusaha UMKM ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman pengusaha terkait SAK-ETAP sebagai dasar dalam praktik akuntansi pada UMKM saat ini. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UKM selama ini dikarenakan pengetahuan akuntansi baik pemilik maupun staf keuangan/akuntansi UKM saat ini masih belum memadai.

### **2.1.3. Pengetahuan Akuntansi**

Pengetahuan akuntansi adalah pengetahuan tentang akuntansi yang dimiliki oleh pengusaha kecil dan menengah. Menurut Jusuf (2003:5) akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, ringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan akuntansi pengusaha (manager), sehingga pemahaman pengusaha (manager) untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widiyanti (2013) bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik UMKM sangat berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, apabila pemilik UMKM memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi, maka semakin mudah melakukan pencatatan akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi.

Menurut berbagai penelitian dalam Marbun (1997), salah satu kelemahan usaha kecil di Indonesia ialah pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Pada umumnya usaha kecil tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

#### **2.1.4. Ukuran Usaha**

Holmes dan Nicholls (1998, dalam Grace 2003) dalam Mulyani (2012) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total asset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ukuran usaha akan mempengaruhi pemilik usaha untuk menentukan langkah dalam memutuskan untuk menggunakan akuntansi. Semakin besar ukuran usaha akan memberikan dampak yang lebih kompleks bagi usaha untuk mencaat pemasukan dan pengeluaran dalam operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pinasti (2001) dalam Rudiantoro dan Siregar (2012) yang menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM.

Ukuran usaha yang besar berimplikasi usaha mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu memperkerjakan karyawan yang lebih baik

(Rudiantoro dan Siregar, 2012). Ukuran usaha yang semakin meningkat besar maka akan membutuhkan dana sebagai modal untuk pengembangan usaha yang semakin besar. Pentingnya pencatatan laporan keuangan diperlukan sebagai informasi akuntansi atas usahanya dan pengambilan keputusan. Sixpria, Suhartati dan Warsini (2013) mengemukakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil, yang mana pada kedua jenis kelompok usaha tersebut masih lebih banyak dikelola secara perseorangan dengan manajemen seadanya.

#### **2.1.5. Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), "Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas." Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya,

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Kieso (2007) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

#### **2.1.6. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK- ETAP diterbitkan pada tahun 2009 yang telah berlaku efektif 1 Januari 2011 setelah diterapkan pada 1 Januari 2010.

Ruang lingkup pengertian SAK ETAP (2009:1) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat



langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik entitas memiliki akuntabilitas publik, yaitu:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

#### a. Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Tujuan laporan keuangan (SAK ETAP 2009:2) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

#### b. Manfaat SAK ETAP

Manfaat SAK ETAP yaitu:

1. Entitas yang dimaksud dapat menyusun laporan keuangannya sendiri.
2. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
3. Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (dari Bank misalnya) untuk pengembangan usaha.

### c. Laporan Keuangan SAK ETAP

#### 1) Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan (SAK ETAP, 2009:19).

#### 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode

terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos : pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan (SAK ETAP, 2009: 23).

### 3) Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

#### a) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut (SAK ETAP, 2009: 26).

#### b) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau

rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi (SAK ETAP, 2009: 27).

#### 4) Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (SAK ETAP, 2009: 28).

##### a) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan (SAK ETAP, 2009:30).

##### b) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan

diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi (SAK ETAP, 2009: 31)

#### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (SAK ETAP, 2009: 34).

Tabel 2.1

Tabulasi Pengungkapan SAK ETAP

No	Elemen Laporan Keuangan	Item Laporan Keuangan
1	Neraca	Kas dan setara kas
		Piutang usaha dan piutang lainnya
		Persediaan
		Properti investasi
		Aset tetap
		Aset tidak berwujud
		Utang usaha dan utang lainnya
		Aset dan kewajiban pajak
		Kewajiban diestimasi
2	Laporan Laba Rugi	Ekuitas
		Pendapatan
		Beban Keuangan
		Bagian laba atau rugi dari investasi
		Beban pajak
3	Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	Laba atau rugi neto
		a. Laporan perubahan ekuitas
		- laba atau rugi untuk periode
		- pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
		- pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

		- rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode
		b. Laporan laba rugi dan saldo laba
		- saldo laba pada awal periode pelaporan
		- dividen
		- penyajian kembali saldo laba setelah koreksi
		- penyajian kembali saldo laba setelah perubahan
		- saldo laba pada akhir periode
4	Laporan Arus Kas	Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	Informasi tambahan yang disajikan

### 2.1.7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

#### 2.1.7.1. Pengertian UMKM

UMKM menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 memberikan penjabaran sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

#### 2.1.7.2. Kriteria UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2008, UMKM memiliki diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Rizki Rudiantoro dan Sylvia Veronica Siregar	Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP	Pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, jenjang pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, dan lama berdiri	Parsial : Pemberian informasi dan sosialisasi serta jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP, lama usaha berdiri berpengaruh negatif, latar belakang pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP  Simultan : Tidak menggunakan uji simultan



2	Rias Tuti dan S, Patricia Febrina Dwijayanti	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP	Pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran usaha	<p>Parsial : Sosialisasi dan pemberian informasi, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Lama usaha secara signifikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.</p> <p>Simultan : Tidak menggunakan uji simultan.</p>
3	Elyana Ayu Soraya dan Amir Mahmud	Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntabilitas Publik	Tingkat pendidikan pemilik, ukuran usaha, umur usaha	<p>Parsial : Tingkat pendidikan pemilik dan ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP, sedangkan umur usaha tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP.</p> <p>Simultan : Tingkat Pendidikan pemilik, ukuran usaha, dan umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan SAK ETAP</p>
4	Rinny Meidiyustiani	Pengaruh pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi dan motivasi pemilik terhadap Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	Pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, penerapan akuntansi, motivasi pemilik	<p>Parsial : Pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, dan motivasi pemilik tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP</p> <p>Simultan : Pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, pelatihan akuntansi dan motivasi pemilik berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.</p>

5	Ersanti Anggunan Dewi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bandar Lampung	Latar belakang pendidikan, umur usaha, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi	<p>Parsial : Latar belakang pendidikan, umur usaha, dan skala usaha tidak berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP sedangkan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.</p> <p>Simultan : Tidak menggunakan uji simultan.</p>
6	Diki Maulana Nugroho	Pengaruh Informasi dan Sosialisasi Akuntansi, serta Ukuran Usaha terhadap Pemahaman UMKM atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada UMKM Batik di Surakarta)	Informasi dan sosialisasi akuntansi, ukuran usaha terhadap pemahaman UMKM atas SAK ETAP	<p>Parsial : Informasi dan sosialisasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM atas SAK ETAP. Ukuran usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM atas SAK ETAP</p> <p>Simultan : Informasi dan sosialisasi akuntansi dan ukuran usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM atas Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).</p>
7	Ni Ayu Putu Uma Dewi, Gede Adi Yuniarta, dan Made Arie Wahyuni	Pengaruh Sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, dan persepsi pelaku UKM terhadap penggunaan SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Buleleng	Sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, dan persepsi pelaku UMKM	<p>Parsial : Sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP.</p> <p>Simultan : Sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, dan persepsi pelaku UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP.</p>

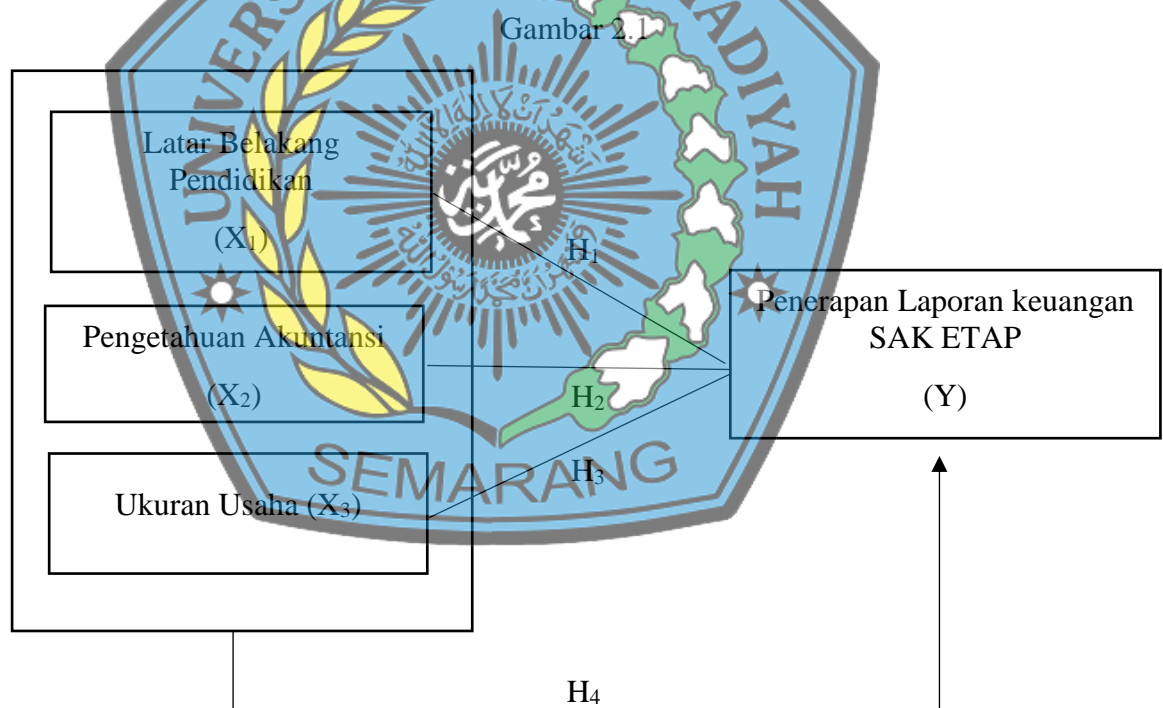
8	Teti Rahmawati dan Oktaviani Rita Puspasari	Implementasi SAK ETAP dan laporan keuangan UMKM terkait akses modal perbankan	Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, dan profesionalisme manajemen	<p>Parsial : Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP.</p> <p>Simultan : Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP.</p>
---	---	---	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

DSAK telah menerbitkan standar akuntansi keuangan baru untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Standar laporan keuangan tersebut bernama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang bertujuan untuk UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang telah disyaratkan Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan UKM yang belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Para pemilik UKM hanya melakukan pencatatan transaksi tanpa disusun laporan keuangan sebagaimana mestinya. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan guna menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinny Meidiyustiani yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pemahaman Akuntansi, dan Motivasi Pemilik Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Empiris : Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Tangerang)”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen Latar Belakang Pendidikan (X1) dan Pengetahuan Akuntansi (X2), dan Ukuran Usaha (X3) yang mempengaruhi penerapan laporan keuangan SAK ETAP sebagai variabel dependen.



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

## **1. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penerapan SAK ETAP**

Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru (Gray 2006; Van Hermet et al. 2011). Pemilik UKM di Indonesia rata-rata masih memiliki pendidikan yang rendah dan akan mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Penelitian yang dilakukan Rinny (2016) menyatakan bahwa pendidikan pemilik tidak berpengaruh pada implementasi SAK ETAP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elyana dan Amir (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah

**H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP**

## **2. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penerapan SAK ETAP**

Pengetahuan akuntansi adalah pengetahuan tentang pencatatan transaksi dan pembukuan yang dimiliki oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handikad Wasilah yaitu “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.” Mudah-mudahan mengakses informasi maupun mempelajari akuntansi dan semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan para pemilik mendorong untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan

tersebut sangat bermanfaat bagi peminjaman kredit ataupun hal lainnya yang membutuhkan laporan keuangan.

Dengan pendapat dari permasalahan diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut

## **H2 : Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP**

### **3. Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Penerapan SAK ETAP**

Holmes dan Nicholls (1998, dalam Grace 2003) dalam Mulyani (2012) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total asset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ukuran usaha akan mempengaruhi pemilik usaha untuk menentukan langkah dalam memutuskan untuk menggunakan akuntansi. Semakin besar ukuran usaha akan memberikan dampak yang lebih kompleks bagi usaha untuk mencaat pemasukan dan pengeluaran dalam operasional. Pemilik usaha akan mempertimbangkan untuk melakukan pencatatan keuangan dengan semakin besarnya ukuran usaha untuk melakukan pelaporan terkait pajak yang harus dilaporkan. Dengan pendapat diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut

## **H3 : Ukuran usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP**

#### **4. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, dan Ukuran Usaha Terhadap Penerapan SAK ETAP**

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan akuntansi yang dimiliki pemilik usaha menyebabkan usaha yang dijalankan menjadi terbatas karena belum memiliki pengetahuan yang memadai. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah yang setiap tahun semakin bermunculan menjadikan persaingan bisnis semakin ketat. Diperlukan adanya strategi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP untuk UKM guna memperoleh kredit sebagai perluasan usaha. Dibutuhkan pengetahuan akuntansi bagi para pelaku UKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Modal yang dimiliki pemilik usaha dan ukuran usaha yang semakin besar, maka diperlukan pengetahuan akuntansi yang memadai untuk pembuatan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi pemilik, modal, dan ukuran usaha bersama-sama saling mempengaruhi dalam usaha. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut

**H4 : Latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi pemilik, dan ukuran usaha berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SAK ETAP.**

